

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(SIPD) DALAM MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH YANG BERKUALITAS (Studi pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang)**

(Skripsi)

Oleh :

RIZKI NANDA PRATAMA

1816041064



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang)

Oleh :

Rizki Nanda Pratama

Perencanaan yang berkualitas diperlukan agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik yang didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Namun masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dapat menghambat tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas termasuk data yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD adalah sebuah sistem yang dibuat sebagai wujud pemanfaatan dan merealisasikan teknologi dalam perencanaan. Implementasi SIPD peneliti analisis melalui teori implementasi dari George C. Edward yang bertujuan untuk mengetahui implementasi SIPD dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Tulang Bawang serta mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dari pelaksanaan kebijakan SIPD di BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SIPD yang di terapkan BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Hal tersebut diukur melalui proses penyusunan dokumen perencanaan, empat indikator perencanaan pembangunan yang berkualitas dari BAPPEDA, serta empat faktor yang mempengaruhi implementasi dari teori Edward III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Meskipun begitu, terdapat faktor penghambat dalam mengimplementasikan SIPD yaitu sumber daya manusia yang kurang berkompeten, informasi tentang kepatuhan pelaksana yang kurang lengkap, serta fasilitas mengenai jaringan yang kurang stabil.

Kata Kunci : Implementasi, SIPD, Perencanaan Pembangunan, Berkualitas

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM (SIPD) IN REALIZING QUALITY REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING (Study at the Regional Development Planning Agency of Tulang Bawang Regency)

By :

Rizki Nanda Pratama

Quality planning is needed so that development can be carried out properly supported by the availability of complete and accurate data and information. However, the limited availability of accurate data and information can hinder the achievement of quality development planning, including the data available at the BAPPEDA of Tulang Bawang Regency. Therefore the government issued a Regional Government Information System (SIPD) policy in the Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019. SIPD is a system created as a form of utilizing and realizing technology in planning. Implementation of SIPD analysis researchers through implementation theory from George C. Edward which aims to determine the implementation of SIPD in realizing quality development planning in Tulang Bawang Regency and to find out the factors that support and hinder the implementation of SIPD policies in BAPPEDA Tulang Bawang Regency. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. Based on the results of the analysis conducted by the researchers, it can be concluded that the implementation of the SIPD policy applied by BAPPEDA in Tulang Bawang Regency has resulted in quality development planning. This is measured through the process of preparing planning documents, four indicators of quality development planning from BAPPEDA, and four factors that influence the implementation of Edward III's theory, namely communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. Even so, there are inhibiting factors in implementing SIPD, namely incompetent human resources, information about implementing compliance that is incomplete, and facilities regarding networks that are less stable.

Key Words : *Implementation, SIPD, Development Planning, Quality*

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(SIPD) DALAM MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH YANG BERKUALITAS (Studi pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang)**

Oleh

RIZKI NANDA PRATAMA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM
MEWUJUDKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH YANG
BERKUALITAS (Studi pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang)**

Nama mahasiswa : **Rizki Nanda Pratama**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816041064**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

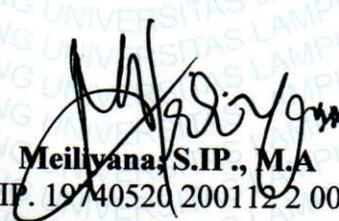


1. **Komisi Pembimbing**


Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.
NIP. 19780923 200312 1 001


Dewi Brima Atika, S.IP., M.Si.
NIP. 19821212 200801 2 017

2. **Ketua Jurusan Administrasi Negara**


Meiliyana, S.IP., M.A
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

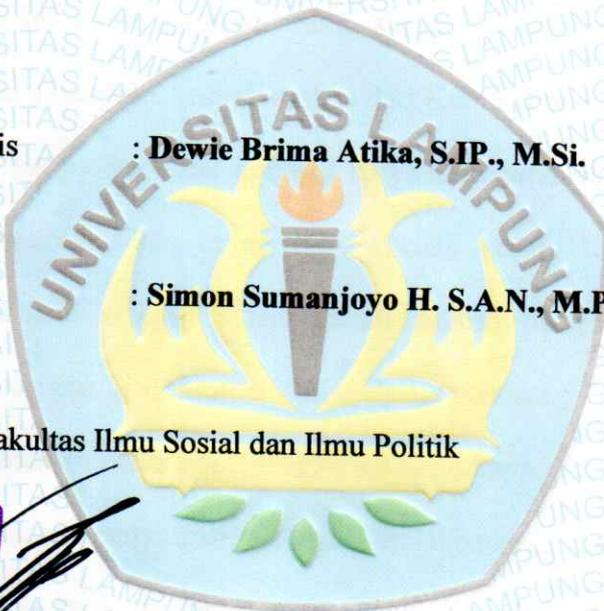
Ketua : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**



Sekretaris : **Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.**



Anggota : **Simon Sumanjoyo H. S.A.N., M.PA.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Februari 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 23 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,



Rizki Nanda Pratama
NPM 1816041064

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rizki Nanda Pratama dan biasa disapa dengan nama Rizki. Penulis lahir tanggal 3 Juli 2000, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Rohmat dan Ibu Ani Purwanti. Penulis berasal dari Base Camp KM 17 PT SIL, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Riwayat Pendidikan penulis dimulai dari menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD 02 YAPINDO lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama di SMP YAPINDO lulus pada tahun 2015, dan terakhir Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Seputih Banyak lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis di terima melalui jalur SBMPTN pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Penulis menghabiskan masa pendidikan tinggi dengan mengikuti berbagai kegiatan akademik dan non-akademik diantaranya; mengikuti tahun 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Sri Budaya, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah serta Magang MBKM di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2021. Di samping itu, penulis juga aktif mengikuti organisasi internal maupun eksternal kampus diantaranya; anggota bidang Rumah Tangga Organisasi 2019-2021 Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA), serta UKM Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) UNILA sebagai (Kabid KPSDA 2019-2020, Kabid Humas 2020-2021)

MOTTO

***Kebaikan Tidak Sama Dengan Kejahatan. Tolaklah
Kejahatan Itu Dengan Cara Yang Lebih Baik,
Sehingga Yang Memusuhimu Akan Seperti Teman
Yang Setia.***

(QS. Fusshilat: 34)

***Sepiro Gedhening Sengsoro Yen Tinompo Amung
Dadi Cobo***

(RM. Imam Koesoepangat)

***Tidak Peduli Berapa Kali Orang Mencoba Untuk
Mengkritik Anda, Balas Dendam Terbaik Adalah
Membuktikan Bahwa Mereka Salah.***

(Zayn Malik)

***Bergerak Dalam Diam, Melakukan Pekerjaan Tanpa
Harus Terlihat Seolah-Olah Tak Terjadi Apa-Apa,
Ibarat Air Tenang Menghanyutkan***

(Rizki Nanda Pratama)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segenap ketulusan hati, ku persembahkan buah karya sederhana ini kepada:

Segenap Keluarga Besar, Wabil khusus Bapak, Ibu, dan Adik

Terima kasih untuk dukungan terbesar dalam hidupku.

Terima kasih atas segalanya pengorbanan dan do'a-do'a yang telah dipanjatkan untuk diriku, kalianlah orang yang selalu menjadi penyemangat dan inspirasiku. Do'amulah yang selalu kau panjatkan untuk menantikan keberhasilanku, dan terima kasih kepada segenap do'a dan harapan keluarga besar, semoga dapat membuka jalan yang lebih baik untuk keluarga besar kedepan.

Sahabat-sahabatku,

Yang selalu memberikan bantuan, dorongan, motivasi dan berbagi keluh kesah dalam perjalanan hidup

Para dosen dan civitas akademika,

Yang telah memberikan bekal ilmu untuk masa depan, dukungan, do'a, dan semangat diri ini dalam melangkah lebih jauh

Almamater tercinta,

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil`alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara (S.A.N) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis Menyadari sepenuhnya bahwa penulisan masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dalam perbaikan skripsi ini. skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi, bimbingan, serta saran semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP. selaku dosen pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu, serta memberikan motivasi dan dukungan untuk tidak berputus asa. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap langkah bapak selalu dilancarkan oleh Allah SWT.
2. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan dukungan, motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga ibu selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan.
3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA. selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu juga memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam proses skripsi ini. Semoga selalu diberi kelancaran dalam segala urusan.

4. Teristimewa untuk orang tuaku tercinta Bapak, Ibu, dan Adikku yang memberikan kasih sayang tak terhingga, perhatian yang amat luar biasa, kesabaran dalam membesarkan dan mendidikku sampai kini, perjuangan yang telah kalian lakukan serta nafkah lahir maupun batin. Terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan kepadaku, aku bangga terlahir sebagai anak bapak dan ibu. Doakan agar aku bisa membahagiakan kalian.
5. BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Dicki Soerachman selaku Kepala BAPPEDA, Bu Sisilia Novitasarie selaku Sekretaris, dan terkhusus bidang sekretariat dan bidang perencanaan (Bu Berti, Bang Robby, Bang Aan, Mas Edi, Mas Sarkis, Bang Arief, Bung Pora, Mbak Mega Bang Ferdhika, Bang Medi), terima kasih atas pengalaman, pengetahuan serta referensi, data dan informasi yang diberikan terkait dengan BAPPEDA khususnya perencanaan pembangunan dan SIPD.
6. Ibu Meiliyana, M.A. selaku Ketua Jurusan dan seluruh Dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara, Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.Si., Bapak Dr. Bambang Utoyo, Bapak Dr. Noverman Djuadji, M.Si., Bapak Dr. Dedy Hermawan S.Sos., M.Si., Bapak Syamsul Ma'arif, S.I.P., M.Si., Ibu Dr. Novita Tresiana, Ibu Intan Fitri Meutia, Ph.D., Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A., Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H., Ibu Anisa Utami, S.I.P., M.A., Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si., Bapak Apandi, S.Sos., M.Si., Ibu Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A., Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, M.AP. terima kasih banyak atas setiap ilmu yang diajarkan selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi bekal yang sangat berguna bagi penulis kedepannya.
7. Bapak Johari dan Mba Wulan selaku staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih atas kesabaran dalam membantu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan, yang cukup rumit dan butuh kedetailan.
8. Keluarga besar Andalusia, terima kasih mewarnai keseharian di kampus orange tercinta. Terkhusus yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi moderator serta mahasiswa pembahas dalam seminar proposal maupun seminar hasil (Januar, Rika, Krisdiyanto, Ega,) kalian luar biasa.
9. Sahabat seperjuangan satu kontrakan/The Qore Squad, dengan anggota tidak tetap yang saling melengkapi baik dari segi anggaran maupun fasilitas di

kontrakan untuk menghemat pengeluaran sehari-hari baik dalam kebutuhan dapur maupun kebutuhan dalam perkuliahan.

10. Teman-teman KKN dari rumah yang telah memberikan pengalaman dalam bentuk kerjasama di setiap program kerjanya (Dimas Arif Kurniawan, Awwaludin Ma'rifatillah, M. Abdul Fattah, Riyan Yuliyato, Indri Setiani, dan Meta Putriani).

11. Saudara-saudara PSHT (UKM PSHT UNILA, PSHT Cabang Bandar Lampung) terima kasih atas dukungan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini baik langsung atau tidak langsung semoga bernilai ibadah semoga Allah memberikan berkah, rahmat, hidayah serta kemuliaan-Nya atas kebaikan dan pengorbanan bagi kita semua.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh kata sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 23 Februari 2023

Penulis,



Rizki Nanda Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Implementasi Kebijakan.....	8
2.1.1 Definisi Implementasi Kebijakan	8
2.1.2 Unsur Unsur Implementasi Kebijakan.....	9
2.1.3 Model-Model Implementasi Kebijakan	10
2.1.4 Tahap Implementasi Kebijakan	15
2.2 Sistem Informasi	16
2.2.1 Karakteristik Sistem Informasi	16
2.2.2 Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi.....	18
2.3 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	19
2.4 Perencanaan Pembangunan	22
2.4.1 Unsur-Unsur Perencanaan pembangunan.....	23
2.4.2 Tahapan Perencanaan Pembangunan.....	24
2.5 Penelitian Terdahulu	26
2.6 Kerangka Berpikir.....	27
III. METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Metode Penelitian.....	29
3.2 Fokus penelitian	30
3.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.4 Sumber Data.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Teknik Analisis Data.....	33
3.7 Keabsahan Data.....	34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	37
4.2 Deskripsi dan Analisis Data	46
4.3 Hasil	53
4.4 Pembahasan.....	95

V. Kesimpulan dan Saran	116
5.1 Kesimpulan	116
5.2 Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	124

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Persentase keterisian data Kabupaten Tulang Bawang 2017-2018 .	3
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	4
Tabel 3. Informan Penelitian	32
Tabel 4. Program kegiatan BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang.....	75
Tabel 5. Keterisian data perencanaan Kabupaten Tulang Bawang 2020-2021	77
Tabel 6. Fasilitas dalam mengoperasikan SIPD di BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang.....	87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berpikir	28
Gambar 2. Komponen analisis data (interactive model).....	33
Gambar 3. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang	39
Gambar 4. Halaman depan aplikasi SIPD	47
Gambar 5. Tahap penyusunan dokumen perencanaan beserta implementasi SIPD dalam prosesnya.....	60
Gambar 6. Kegiatan sosialisasi SIPD oleh Pemkab Tulang Bawang	82
Gambar 7. Grafik tingkat pendidikan pegawai BAPPEDA Tulang Bawang	93
Gambar 8. Tampilan aplikasi SIPD server eror.....	95

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah terdapat kegiatan perencanaan yang berorientasi terhadap pembangunan daerahnya masing-masing. Suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai pembangunan jika terdapat serangkaian usaha peningkatan serta perubahan terencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi, dalam rangka menuju modernitas pembinaan bangsa (Yulyana, 2015). Pada hakikatnya pembangunan tak bisa terpisahkan dari pertumbuhan, yang berarti pembangunan bisa berakibat pada terjadinya pertumbuhan yang timbul sebagai dampak dari pembangunan. Hasil dari kegiatan pertumbuhan dapat berupa perkembangan atau peningkatan dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat. Berbicara mengenai praktek dari pembangunan, maka akan berkaitan dengan proses perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan yang berkelanjutan, terdiri atas keputusan yang dilakukan dengan beberapa cara untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu di masa depan (Kartono & Nurcholis, 2016).

Kompleksitas dalam tahap perencanaan pembangunan menimbulkan suatu pertanyaan yakni bagaimana prosedur yang tepat dari proses perencanaan pembangunan di suatu daerah agar dapat memanfaatkan pengalokasian sumber daya di daerah tersebut secara efektif, efisien serta berkualitas. Perencanaan yang berkualitas diperlukan agar pembangunan dapat dilaksanakan sesuai target dan arah yang ditentukan. Kualitas perencanaan pembangunan yang baik memerlukan dukungan dari ketersediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, menyangkut sumber daya yang tersedia, serta berbagai persoalan yang dapat dijadikan sasaran dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Kualitas perencanaan pembangunan perlu ditunjang dengan keberadaan data dan informasi yang lengkap, akurat, terukur, serta valid yang berikutnya definisikan menjadi indikator pembangunan. Indikator pembangunan tersebut merupakan penyedia bagi tujuan perencanaan pembangunan. Dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik untuk menciptakan kesetaraan dalam pembangunan yang adil. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan pembangunan di daerah, menangani masalah kemiskinan, , mengurangi kesenjangan sosial yang merata, pengangguran, memberikan akses yang sama pada masyarakat ke setiap layanan sosial dan fasilitas ekonomi, dan menghilangkan diskriminasi dalam setiap aspek.

Perencanaan pembangunan dalam sistem pemerintahan pemerintah pusat dan daerah saat ini memerlukan komponen pendukung, khususnya terkait sistem informasi dalam membantu proses pengambilan keputusan, menyimpan dan mengolah kebutuhan data. Perencanaan pengembangan daerah perlu didasarkan pada informasi dan data yang terintegrasi dengan sistem pembangunan nasional, dan terkoneksi dengan informasi pemerintah daerah yang digunakan sebagai alat bantu dalam membangun daerah (Bappedalitbang, 2019). Penting untuk merencanakan pembangunan daerah sesuai dengan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar permasalahan, tujuan, sasaran, isu strategis, strategi, program, dan kegiatan yang dirancang dapat berhasil. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 274 ditekankan bahwa “Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.” Pernyataan ini sejalan dengan isi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menekankan bahwa “setiap lembaga publik wajib menyediakan, memberikan, atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah tanggung jawabnya, baik diminta maupun tidak diminta.”

Selain itu, lembaga publik juga diwajibkan untuk membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang baik serta efisien agar informasi publik tersebut bisa dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat. Dalam menyusun rencana pembangunan, penting untuk menggunakan data yang tersedia. Data yang sudah diolah bisa menghasilkan informasi yang dapat

digunakan sebagai pemahaman mengenai fakta-fakta yang terkait dengan rencana itu. Oleh karenanya, data yang sudah diproses juga disebut sebagai informasi. Data dan informasi yang didapatkan berperan penting dalam menentukan kebijakan pembangunan di suatu daerah, terutama di era desentralisasi saat ini, cara merencanakan pembangunan juga telah berubah paradigma. Proses perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up*) sekarang dilakukan lebih intensif dibandingkan sebelumnya.

Persoalan yang sering menjadi faktor menghambat dalam menciptakan proses perencanaan pembangunan yang berkualitas salah satunya yaitu keterbatasan data dan informasi yang tersedia terutama data yang akurat dan sesuai dengan perkembangan zaman (*up to date*). Berikutnya berkaitan dengan sinkronisasi serta koordinasi antar data yang tersedia di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih kurang, sehingga data-data yang seharusnya saling terhubung satu sama lain menjadi terpisah-pisah dan sulit untuk diakses. Tak terkecuali di Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan hasil dari pengumpulan data sementara dari proses pra riset yang dilaksanakan peneliti di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulang Bawang, ditemukan permasalahan mengenai keterisian dari data perencanaan pembangunan, dengan rincian:

Tabel 1. Persentase keterisian data Kabupaten Tulang Bawang 2017-2018

No	Keterangan	Tahun	
		2017	2018
1	Target	89,35%	89,35%
2	Realisasi keterisian data	50,39%	54,54%

Sumber : Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang 2018

Tidak tercapainya target mengenai keterisian data tersebut berdampak kepada capaian indikator perencanaan pembangunan menjadi belum maksimal, rincian capaian indikator tersebut yaitu:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi	
		2017	2018
Kinerja perencanaan pembangunan meningkat	Indeks perencanaan pembangunan	74,23%	73,22%

Sumber : Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang 2018-2019

Keadaan yang tergolong rumit, data-data pembangunan daerah cenderung kurang utuh dan tersebar di setiap SKPD, serta data yang jarang diperbarui menjadi latar belakang perencanaan pembangunan yang tidak berkualitas. Selain itu, kendala lain yang dihadapi BAPPEDA yaitu dalam menghimpun data dari SKPD yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara BAPPEDA dan SKPD. Selain itu, banyaknya kelompok dan komponen data yang perlu dimasukkan menyebabkan BAPPEDA kesulitan memberi arahan tentang penginputan data kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh karena itu, ada masalah tentang siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan data. Sebagai pelaksana pembangunan, pemerintah daerah harus bisa mengumpulkan dan mengakomodasi semua data dan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk itu, diperlukan basis data (*database*) yang dapat menampung seluruh data dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan (Kasmira, Alyas, & Sudarmi, 2020).

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, pemerintah daerah hendaknya perlu memiliki *database* yang valid, terukur dan terupdate. Data dan informasi berperan penting dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan serta menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan memaksimalkan realisasi target pembangunan yang disajikan dalam suatu sistem informasi. Sistem informasi yang dimaksud yaitu suatu aplikasi sistem informasi manajemen. Sistem informasi dibutuhkan untuk memudahkan pemerintah memperoleh informasi yang berguna dalam penyusunan perencanaan, baik yang terkait dengan pembangunan yang bersifat rutin atau keputusan-keputusan pembangunan yang strategis.

Salah satu kebijakan yang mulai diterapkan pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang sudah diwajibkan penggunaannya secara nasional sejak tahun anggaran 2021, sehingga seluruh OPD khususnya BAPPEDA dalam melakukan proses perencanaan pembangunan perlu berpedoman pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Untuk mendorong kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, diperlukan bantuan dari data dan informasi pembangunan daerah yang lengkap, cermat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah diberlakukan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, diharapkan percepatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh Pemerintah Daerah dapat segera dilakukan sehingga dapat diintegrasikan pada seluruh sistem dengan data pembangunan dan data keuangan daerah ke dalam sistem SIPD. Ini menjadi bagian utama dalam mengganti kendali dan mencapai sasaran yang sudah terencana (Ekaputra, 2021). Pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan dan menggunakan teknologi data yang berkembang dalam proses perencanaan dan anggaran, agar dapat secara transparan menyalurkan data tersebut kepada masyarakat dan mematuhi prinsip *good government*. Sebagai bentuk teknologi yang dimanfaatkan dalam hal ini, dibuatlah SIPD oleh Kemendagri, yang bertujuan untuk membuktikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.

Kebijakan tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, pengembangan *e-government* yang diinstruksikan dalam mencapai sasaran, yakni:

- 1) Membentuk jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang bisa memberi kepuasan pada masyarakat secara merata dan menjangkau seluruh wilayah tanah air.

- 2) Membentuk hubungan interaktif dengan sektor swasta guna menunjang perkembangan ekonomi nasional serta meningkatkan kekuatan menghadapi kompetisi dagang internasional.
- 3) Membentuk sistem manajemen serta aktivitas kerja yang efisien dan transparan guna melancarkan transaksi dan layanan antar kerangka pemerintah serta daerah otonom.
- 4) Membentuk sistem dan saluran komunikasi dengan lembaga negara dan memfasilitasi komunikasi publik bagi masyarakat untuk terlibat dalam merumuskan kebijakan negara.

Tujuan dari implementasi SIPD adalah untuk meningkatkan dan mempermudah percepatan implementasi, kontrol dan evaluasi kegiatan pemerintahan khususnya perencanaan oleh pemerintah daerah. Namun, menjalankan program ini cukup sulit, karena membutuhkan kerja sama serta usaha dari seluruh lembaga yang terlibat. Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan adanya hambatan pada awal penerapan SIPD, mulai dari keterlambatan pengisian dari setiap instansi yang wajib mengisi data perencanaan juga terdapat staf yang kurang menguasai serta menyelesaikan masalah di SIPD. Untuk mendapat pengetahuan berkaitan dengan keberhasilan dari implementasi SIPD dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, maka peneliti menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward. Dalam teori tersebut keberhasilan implementasi diukur melalui empat variabel yaitu variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan fenomena yang telah peneliti jabarkan pada latar belakang penelitian, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti mengenai bagaimana Implementasi dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas khususnya di Kabupaten Tulang Bawang. Oleh karena itu peneliti akan meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana implementasi SIPD dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Tulang Bawang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam penerapan SIPD dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui implementasi dari SIPD dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Memperoleh pengetahuan mengenai faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi dalam penggunaan SIPD dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta informasi sebagai referensi khususnya BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang, serta masyarakat publik pada umumnya, yang terkait dengan implementasi SIPD dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Manfaat Akademik, dapat menambah pengetahuan peneliti dari penelitian yang dilakukan dengan mengaplikasikan ilmu yang didapat pada perkuliahan dalam pembahasan mengenai implementasi SIPD dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Tulang Bawang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

2.1.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Secara etimologis “implementasi” seperti yang dijelaskan oleh Mazmanian dan Sabatier (Pramono, 2020), bahwa implementasi merujuk pada fokus pelaksanaan kebijakan, yang mencakup tindakan dan kegiatan yang terjadi setelah kebijakan disahkan oleh pemerintah. Hal ini mencakup upaya untuk mengadministrasikan kebijakan dan mempengaruhi masyarakat atau situasi yang terjadi. Sedangkan istilah "kebijakan" dipakai untuk merujuk pada aktivitas pemerintah seperti perilaku negara pada umumnya. Menurut Carl Friedrich dalam (Wahab, 2012), kebijakan adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan oleh kelompok, seseorang, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, dan dilakukan dengan mengatasi hambatan tertentu serta menemukan peluang untuk mencapai tujuan tersebut.

Sehingga implementasi kebijakan publik menurut (Tachjan, 2006), yaitu proses administratif yang terjadi usai kebijakan telah ditetapkan. Keberhasilan suatu kebijakan dan kegiatan dalam mengambil keputusan sangat ditentukan dari bagaimana kebijakan diimplementasikan. Proses ini terletak pada tahapan setelah penetapan kebijakan. Implementasi kebijakan menggunakan logika *top-down*, yaitu dengan menyederhanakan alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkret atau mikro. Sebaliknya, formulasi kebijakan menggunakan logika *bottom-up*, di mana kegiatan dimulai dari pemetaan keperluan publik, kemudian alternatif pemecahan masalah dicari dan dipilih, kemudian diusulkan untuk ditetapkan sebagai kebijakan. Secara umum, implementasi bertugas membangun suatu mata rantai yang memungkinkan tujuan

dari suatu kebijakan dapat diwujudkan sebagai akibat dari tindakan pemerintah. Maka dari itu, implementasi perlu melibatkan pembentuk "sistem penyampaian kebijakan" di mana fasilitas tersebut dirancang khusus dengan harapan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Rian Nugroho (Lumabi, 2021), pelaksanaan kebijakan merupakan cara untuk mencapai target yang lebih jauh dengan memastikan bahwa tindakan yang diambil sejalan dengan arah yang sudah ditentukan. Implementasi ini penting untuk memastikan ketercapaian suatu kebijakan.

2.1.2 Unsur Unsur Implementasi Kebijakan

Dalam (Tachjan, 2006) mendeskripsikan mengenai unsur-unsur dalam menimplementasikan suatu kebijakan yang harus ada, diantaranya:

- a. Unsur pelaksana. Dimock dan Dimock dalam (Tachjan, 2006) menjelaskan bahwa unsur pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan mencakup berbagai aspek, mulai dari menentukan target dan sasaran organisasi, analisis dan perumusan kebijakan serta strategi organisasi, perencanaan, pengambilan keputusan, penyusunan program, penggerakan manusia, pengorganisasian, pelaksanaan operasional, pengawasan, hingga penilaian..
- b. Adanya program yang dilaksanakan. Implementasi kebijakan publik tak dapat dianggap signifikan kecuali jika terdapat program atau kegiatan konkret yang dilaksanakan. Program atau kegiatan tersebut haruslah terencana secara komprehensif dan menggambarkan penggunaan sumber daya yang terpadu dalam satu kesatuan.
- c. Kelompok sasaran. kelompok sasaran merupakan kelompok atau organisasi dalam masyarakat yang akan mendapat barang atau jasa yang terpengaruhi perilakunya akibat adanya kebijakan. faktor komunikasi juga sangat berpengaruh bagi penerimaan kebijakan, sehingga kegagalan proses komunikasi dapat menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan.

2.1.3 Model-Model Implementasi Kebijakan

a. Model Proses Administratif dan Politik oleh Marille S. Grindle

Merilee S. Grindle dalam (Subarsono, 2012) menjelaskan terkait Keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan terpengaruh dari dua faktor utama, yaitu isi kebijakan dan lingkungan pelaksanaannya. Isi kebijakan meliputi seberapa jauh kepentingan kelompok sasarannya diakomodasi dalam kebijakan, bentuk manfaat yang akan diterima oleh kelompok sasaran, sejauh mana perubahan yang diharapkan dari kebijakan tersebut, apakah kebijakan tersebut sudah ditempatkan dengan tepat, apakah kebijakan sudah merinci pelaksanaannya, dan apakah program ditunjang oleh sumber daya yang memadai. Sementara itu, menurut (Wibawa, 2012), model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan lingkungan pelaksanaannya. Konsep utamanya yaitu usai kebijakan direvisi, implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dan kesuksesannya ditentukan oleh seberapa mudah kebijakan itu dapat diimplementasikan. Keberhasilannya ditentukan dari derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Ada enam indikator dalam variabel isi kebijakan yaitu:

- 1) Kepentingannya mempengaruhi. Kebijakan yang dibuat membawa dampak terhadap proses politik yang di “stimuli” oleh kegiatan perumusan kebijakan.
- 2) Manfaat yang diperoleh. Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif, dapat dengan mudah untuk diterapkan. Sedangkan kebijakan yang hanya menyediakan manfaat dan dapat habis dibagi dan bersifat khusus dapat menimbulkan konflik.
- 3) Perubahan yang diharapkan. kebijakan dalam jangka panjang menuntut perubahan, pelaksana akan mengalami kesulitan dalam implementasinya.
- 4) Letak pengambilan keputusan. Semakin tersebar pelaksana baik secara geografis maupun organisasi, maka akan semakin susah untuk diterapkan.
- 5) Pelaksana program. Kualitas dari pelaksana kebijakan dapat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan implementasi.

- 6) Sumber-sumber yang dapat dialokasikan. Ketersediaan sumber daya yang mencukupi dapat menunjang implementasi kebijakan.

Variabel lingkungan kebijakan meliputi 3 indikator, yaitu:

- 1) Kekuasaan, kepentingan serta strategi dari para aktor yang terlibat. Keterlibatan para aktor ditentukan berdasarkan isi serta bentuk dari kebijakan yang diadministrasikan.
- 2) Ciri-ciri kelembagaan/rezim yang berkuasa. Kemampuan dari para pihak yang terlibat dan karakteristik dari rezim di mana berinteraksi, mempermudah penilaian terhadap tingkat peluang untuk mewujudkan tujuan kebijakan.
- 3) Respons dan daya tanggap. Pelaksana harus fokus pada bagaimana menciptakan konsistensi tujuan dalam kebijakan. Pelaksana perlu mampu mengubah sikap menentang menjadi menerima dari suatu kebijakan.

Secara singkat "*Contents of Policy*" memiliki pengaruh terhadap kesuksesan implementasi. Penting untuk mempertimbangkan siapa yang terkena dampak, apa manfaat yang diperoleh, serta bagaimana respons masyarakat atau kelompok target terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, seberapa jauh program tersebut dapat mencapai perubahan, serta peran dari "*street level bureaucrats*" yang bertindak sebagai pelaksana di lapangan, juga dapat berpengaruh terhadap hasil implementasi kebijakan dan reaksi masyarakat terhadapnya (Asyaroh, 2019).

b. Model Analisis Implementasi Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, menjuluki teorinya yang disebut *A Frame Work for Implementations Analysis* (1983). Mazmanian dan Sabatier (1979) menjelaskan tentang arti implementasi yang menyatakan bahwa fokus implementasi kebijakan yaitu paham dengan apa yang terjadi usai suatu kebijakan diedarkan atau dirumuskan. Hal ini mencakup kejadian dan aktivitas yang timbul usai pedoman kebijakan ditetapkan, termasuk upaya untuk mengadministrasikannya serta menciptakan situasi yang terjadi pada masyarakat (Sabatier & Mazmanian, 1980). Menurut kerangka pemikiran ini,

variabel-variabel yang berpengaruh terhadap ketercapaian tujuan-tujuan pada keseluruhan proses implementasi dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Mudah/tidaknya masalah dikendalikan, dengan indikator:
 - a) Keragaman perilaku kelompok sasaran
 - b) Kesukaran-kesukaran teknis
 - c) Persentase kelompok sasaran sebanding jumlah penduduk
 - d) Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan
2. Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi, dengan indikator :
 - a) Kejelasan dan konsistensi tujuan
 - b) Akses formal pihak luar
 - c) Ketepatan alokasi sumber anggaran
 - d) Digunakannya teori kausal yang memadai
 - e) Keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana
 - f) Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana
 - g) Rekrutmen pelaksana
3. Variabel di luar kebijakan yang berpengaruh pada proses implementasi, dengan indikator :
 - a) Dukungan publik
 - b) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi
 - c) Dukungan dari pimpinan
 - d) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana
 - e) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok

Ketiga kategori variabel tersebut sebagai variabel bebas yang berpengaruh terhadap tahapan proses implementasi kebijakan.

c. Model Implementasi Masalah Kebijakan oleh George C. Edwards III

Teori dari George C. Edward III peneliti gunakan menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian. Edward III menyebutkan model implementasi kebijakan publiknya yaitu “implementasi langsung dan tidak langsung”. Dalam bukunya (Edward, 1980) ada empat variabel yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu kebijakan yaitu:

- 1) Komunikasi. Menurut Edward III, variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan dalam implementasi kebijakan publik yang efektif. Dalam hal ini, keputusan dan peraturan harus dikomunikasikan dengan baik kepada semua pelaksana yang terlibat agar mereka mengetahui apa yang harus dilaksanakan. Ada dua indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
- 2) Sumber daya. Sumber daya merupakan variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III untuk menerapkan suatu kebijakan, indikator sumber daya terdiri dari beberapa indikator, seperti staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.
- 3) Disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Sikap implementor kebijakan menjadi faktor penting dalam pendekatan implementasi kebijakan publik yang efektif. Implementor kebijakan tidak hanya perlu mengetahui apa yang harus dilaksanakan, namun harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Variabel disposisi memiliki dua hal yang harus diperhatikan, yaitu pengangkatan birokrat dan insentif.
- 4) Struktur birokrasi. Menurut Edward III, variabel keempat yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Meskipun sumber daya untuk melakukan kebijakan tersedia, atau implementor kebijakan tahu apa yang harus dilaksanakan dan ingin melaksanakannya, kebijakan tersebut mungkin tidak terealisasi jika ada kekurangan pada struktur birokrasi.

d. Model Proses Implementasi oleh Van Metter dan Van Horn

Van Metter dan Van Horn memulai teorinya dengan mengemukakan bahwa perbedaan dalam proses implementasi terpengaruh oleh karakteristik kebijakan yang diterapkan. Dalam pendekatannya, mereka berusaha untuk menghubungkan isu dengan implementasi kebijakan, dan menawarkan suatu

model konseptual yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja. Mereka menekankan bahwa konsep perubahan, kontrol, dan kepatuhan merupakan unsur utama dalam proses implementasi. Dengan mempertimbangkan konsep tersebut, ada beberapa pertanyaan yang harus dipertimbangkan, seperti: Apa saja hambatan yang mungkin terjadi saat memperkenalkan perubahan di dalam suatu organisasi? Seberapa efektif mekanisme kontrol pada setiap tingkat struktur organisasi, dan bagaimana kekuasaan terdistribusi di dalam organisasi? Seberapa penting keterikatan setiap orang dalam organisasi, dan bagaimana ini berhubungan dengan masalah kepatuhan? Berdasarkan pandangan ini, Van Meter dan Van Horn membuat tipologi kebijakan yaitu:

- 1) Jumlah setiap perubahan yang dihasilkan,
- 2) Jangkauan kesepakatan pada tujuan di antara pihak yang terlibat.

Alasan yang diberikan menjelaskan bahwa proses pelaksanaan suatu kebijakan terpengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, yang berarti bahwa pelaksanaan dianggap berhasil jika perubahan yang diinginkan sedikit, dan jika ada sedikit kesepakatan di antara pihak yang menjalankan program tersebut. Kedua ahli tersebut juga menyatakan bahwa ada sejumlah variabel bebas yang saling berhubungan yang memisahkan tahap antara kebijakan dan kinerja. Variabel bebas tersebut yaitu:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan.
- 2) Sumber kebijakan.
- 3) Karakteristik Badan Pelaksana.
- 4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan.
- 5) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Variabel kebijakan berkaitan dengan sasaran yang disepakati dan sumber daya yang ada. Perhatian difokuskan pada badan pelaksana, termasuk organisasi formal dan informal, dan komunikasi antara lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan program, termasuk hubungan antara lingkungan politik dan kelompok sasaran. Terakhir, perhatian pusat dilakukan pada penilaian sikap pelaksana dalam mengevaluasi orientasi mereka yang menjalankan program di lapangan.

2.1.4 Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang rumit memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Namun, jika struktur birokrasi tidak kondusif maka efektivitas sumber daya dapat terhambat dan mengganggu pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh tujuan yang ditetapkan dan cara di mana tujuan tersebut diungkapkan. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat tentang jenis kebijakan dan program yang akan dijalankan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan harus mampu mendukung kebijakan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan baik. Tahapan dalam mengimplementasikan kebijakan publik menurut (Tachjan, 2006) yakni:

- a. Merancang program serta rincian tugas dan tujuan yang jelas, penentuan ukuran dan target capaian yang jelas serta waktu dan anggaran.
- b. Melaksanakan program dengan memanfaatkan struktur-struktur prosedur personalia, anggaran, serta sumber-sumber dan metode yang tepat.
- c. Membangun sistem penjadwalan, *monitoring* dan sarana-sarana kontrol yang tepat serta mengevaluasi hasil dari pelaksanaan kebijakan.

Dalam beberapa kasus, implementasi kebijakan yang gagal dapat terjadi ketika kebijakan tersebut telah diterapkan sesuai dengan rencana awal, tetapi situasi eksternal yang tidak terduga, seperti bencana alam, pergantian kekuasaan atau peristiwa lainnya, menghambat keberhasilan kebijakan tersebut dalam mencapai dampak atau hasil akhir yang diinginkan. Biasanya, kebijakan yang berisiko untuk tidak berhasil dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut :

- a. Kebijakan yang buruk (*bad policy*)
- b. Pelaksanaan kebijakan yang buruk (*bad execution*)
- c. Kebijakan itu sedang bernasib buruk (*bad luck*)

Oleh karena itu, terkadang kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh para pembuat kebijakan atau pelaksana yang ditugaskan, sehingga dianggap sebagai pelaksanaan yang buruk. Ini terjadi ketika mereka berasumsi bahwa faktor eksternal tidak menguntungkan bagi keberhasilan implementasi dan

tidak ada yang perlu disalahkan. Secara sederhana, kebijakan tersebut dianggap gagal karena faktor di luar kendali.

2.2 Sistem Informasi

2.2.1 Konsep Sistem Informasi

Sistem menurut Romney dan Steinbart (2015:3), merupakan “suatu rangkaian yang terdiri beberapa komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang dibagi ke dalam subsistem yang lebih kecil untuk mendukung sistem yang lebih besar”. Sehingga dapat diartikan bahwa Sistem Informasi dalam organisasi merupakan kombinasi antara manusia dan teknologi yang mengerjakan suatu proses informasi. Sistem Informasi menggunakan perangkat elektronik berupa perangkat keras, basis data, perangkat lunak, prosedur, model analisis dan proses administratif pengambilan keputusan yang dikemas menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna sistem tersebut (Almazan, dkk, 2017). Pengelolaan kegiatan ini dapat dipakai sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, sedangkan hasilnya digunakan sebagai tujuan tertentu dalam kegiatan organisasi.

2.2.1 Karakteristik Sistem Informasi

Karakteristik Sistem Menurut (Hartono, 2004) bahwa suatu sistem memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu, yakni memiliki komponen-komponen, batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, *input*, pengolah, *output*, tujuan, dan sasaran.

- a. Komponen sistem. Sebuah sistem terdiri dari beberapa komponen yang berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan satu kesatuan. Komponen sistem dapat berupa subsistem yang memiliki sifat-sifat sistem untuk mengerjakan perintah tertentu dan berpengaruh terhadap sistem secara keseluruhan.
- b. Batas Sistem. Batas sistem adalah area yang memisahkan suatu sistem dari sistem lain di sekitarnya. Batas sistem memungkinkan sistem dilihat sebagai satu kesatuan dan menunjukkan cakupan sistem tersebut.
- c. Lingkungan Sistem. Lingkungan sistem adalah segala sesuatu di luar batas sistem yang berpengaruh terhadap operasi sistem. Lingkungan luar sistem

dapat memberikan manfaat (energi bagi sistem dan harus dijaga) atau dapat merugikan (harus dikendalikan dan ditahan).

- d. **Penghubung Sistem.** Penghubung sistem berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara subsistem-subsistem yang ada. Fungsinya adalah untuk memfasilitasi aliran sumber daya dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Dalam hal ini, keluaran dari sebuah subsistem dapat menjadi masukan bagi subsistem lain melalui penghubung. Melalui penghubung, subsistem dapat berinteraksi dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah kesatuan yang terintegrasi.
- e. **Masukan Sistem.** Masukan sistem merujuk pada energi yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Ada dua jenis masukan sistem, yaitu masukan perawatan dan masukan sinyal. Masukan perawatan berfungsi sebagai sumber daya untuk menjaga sistem agar tetap dapat beroperasi dengan baik. Sedangkan, masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk menghasilkan keluaran yang berguna.
- f. **Keluaran Sistem.** Keluaran sistem adalah hasil dari pengolahan energi yang masuk ke dalam sistem. Keluaran ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran yang berguna dapat menjadi masukan bagi subsistem lainnya atau bagi super sistem.
- g. **Pengolah Sistem.** Pengolah sistem adalah bagian dari sistem yang berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Pengolah sistem ini dapat memiliki berbagai macam jenis dan bentuk, tergantung pada jenis sistem yang sedang dioperasikan.
- h. **Sasaran Sistem.** Sasaran sistem adalah tujuan atau objektif yang ingin dicapai oleh sebuah sistem. Tanpa adanya sasaran atau tujuan, sistem tidak akan memiliki nilai dan manfaat yang jelas. Keberhasilan sebuah sistem diukur berdasarkan sejauh mana sistem tersebut dapat mencapai sasarannya atau tujuannya.

Setiap elemen memerlukan informasi yang berbeda sesuai kebutuhannya. Manajemen terdiri dari serangkaian proses yang dilakukan oleh pengelola perusahaan, seperti merencanakan (membuat strategi, menetapkan tujuan, dan menentukan tindakan yang harus dilakukan), memprakarsai, mengorganisasikan,

mengoordinasikan, dan mengendalikan operasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sistem informasi merupakan sebuah sistem informasi yang menghasilkan keluaran (*output*) dengan menggunakan masukan (*input*) dan melalui berbagai proses yang dibutuhkan untuk mencapai target tertentu dalam kegiatan organisasi.

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi

Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi yang berguna bagi para penggunanya. Informasi sendiri merupakan data yang telah diolah dan disusun sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pengguna. Agar informasi dapat bermanfaat, maka informasi tersebut haruslah tepat sasaran atau relevan dengan kebutuhan pengguna, tepat waktu, dan akurat atau tepat nilainya. Oleh karena itu, informasi yang tidak terdapat satu dari tiga kriteria tersebut tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat. Usman yang dikutip dalam (Purnama, 2016) menyatakan bahwa untuk dikategorikan sebagai sistem informasi, hasil yang dihasilkan haruslah berupa informasi yang memenuhi ketiga kriteria tersebut yaitu relevan, tepat waktu, dan akurat. Menurut Jogiyanto dalam (Hartono, 2004) faktor-faktor yang menentukan kehandalan dari suatu sistem informasi dapat dikatakan baik bila terdapat kriteria-kriteria berikut :

- a. Keunggulan (*usefulness*), Sistem yang unggul harus memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi.
- b. Kehandalan (*Reliability*), sistem harus menghasilkan keluaran yang akurat dengan tingkat ketelitian tinggi dan beroperasi secara efektif.
- c. Ekonomis (*Economic*), sistem harus memberikan manfaat minimal yang setara dengan biayanya.
- d. Sederhana dalam kemudahan (*Simplicity*), sistem harus sederhana dan mudah dipahami sehingga struktur dan operasinya dapat dipahami dengan mudah dan prosedur mudah digunakan.
- e. Fleksibel (*Fleksibility*) sistem informasi harus dapat dipakai disetiap kondisi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- f. Pelayanan (*Customer Service*), sistem harus menyediakan layanan yang efektif dan efisien kepada pengguna ketika berinteraksi dengan organisasi.
- g. Kapasitas (*Capacity*), setiap sistem harus memiliki kapasitas yang sesuai untuk menangani volume yang diperlukan pada setiap periode.

Keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai target sangat bergantung pada keahlian pelaksana yang mengelolanya. Manajemen merupakan suatu metode yang mengatur dan mengelola organisasi yang dapat diartikan sebagai seni dalam melaksanakan tugas melalui seseorang. Jika manajemen suatu organisasi berjalan dengan baik, maka akan menunjang kesejahteraan organisasi. Oleh karena itu, Sistem Informasi dibentuk untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan, baik keputusan rutin maupun keputusan strategis. Sistem informasi menjadi sistem yang memberi pengelola organisasi dengan data dan informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi (Vellya Asril Imami, 2021). Berikut manfaat atau fungsi sistem informasi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penunjang aksesibilitas data yang diberikan secara tepat dan akurat bagi para pengguna, tanpa mewajibkan adanya perantara sistem informasi.
- b. Penjaminan ketersediaan kualitas dan kemampuan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
- c. Pengidentifikasian keperluan-keperluan akan kemampuan pendukung sistem informasi.
- d. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif.
- e. Penetapan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi.
- f. Perbaikan produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem.
- g. Mengantisipasi dan memahami dampak ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru.

2.3 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang kemudian disingkat SIPD yaitu “pengelolaan informasi pembangunan

daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.” Pada tahun 2020, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) diluncurkan sebagai sebuah sistem berbasis online dan terdiri dari sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan dan pengawasan daerah lainnya. SIPD memberikan gambaran umum tentang daerah di seluruh Indonesia dan merupakan bagian dari upaya *e-government* dalam meningkatkan kinerja pemerintah dengan masyarakat lainnya menuju *Good governance*.

Pemerintah daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dapat menggunakan SIPD untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas, cepat dan inovatif. Sistem ini menyajikan data pembangunan masing-masing daerah secara interaktif dan dilengkapi dengan analisisnya. Tampilan visual SIPD memudahkan pengguna untuk memahami data yang ditampilkan tanpa perlu membaca teks atau tabel yang monoton. Data dan informasi pembangunan daerah sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Dalam SIPD terdapat empat komponen yang terdapat dalam sistem informasi pemerintahan daerah, di antaranya:

- a. Data berbasis elektronik/ *e-Database*;
- b. Perencanaan berbasis elektronik/ *e-Planning*;
- c. Monitoring dan evaluasi berbasis elektronik/ *e-Monev*; dan
- d. Pelaporan berbasis elektronik/ *e-Reporting*.

SIPD memegang peran penting dalam mendukung ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang mutakhir, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, SIPD juga berperan dalam mendorong sinkronisasi data antara pusat dan daerah untuk mencapai *single database* nasional. Oleh karena itu, penggunaan SIPD harus dioptimalkan untuk mendukung tercapainya sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah yang efektif dan efisien (Winarno, Kusnadi, & Afriliana, 2019). *E-Database* adalah aplikasi online yang digunakan untuk mendokumentasikan dan mengadministrasikan data dan informasi kondisi daerah. Tujuan diluncurkannya SIPD oleh Kemendagri

adalah untuk memudahkan daerah dalam melakukan perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi dan seragam di seluruh daerah (Ekaputra, 2021).

Untuk mencapai *Good Governance* dan menghasilkan satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat, sangat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu secara Nasional. Untuk itu, diterbitkanlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

- a. Informasi Pembangunan Daerah. SIPD memiliki kemampuan untuk mengelola data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan banyak elemen. Dengan menggunakan SIPD, dapat memudahkan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD, dan RENJA-PD serta memberikan profil dan analisis tentang pelaksanaan pembangunan daerah. Data dan informasi ini dapat digunakan sebagai referensi dalam memperbarui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- b. Informasi Keuangan Daerah. SIPD dapat mengelola data keuangan daerah dengan efektif dan efisien, dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. SIPD mampu melakukan pengelolaan keuangan daerah, seperti perencanaan keuangan daerah, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran daerah, akuntansi dan pelaporan anggaran daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah, pertanggungjawaban barang milik daerah, serta informasi keuangan daerah lainnya.
- c. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya. Selain itu, SIPD juga mampu memberikan informasi umum lainnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, seperti Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dalam satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait.

2.4 Perencanaan Pembangunan

2.4.1 Konsep Perencanaan Pembangunan

Pembangunan merupakan proses perubahan dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai kondisi yang lebih baik berdasarkan aturan-aturan tertentu. Segala bentuk pembangunan tak terlepas dari pembangunan. Perencanaan dalam arti luas menurut Tjokroamidjojo yaitu proses menyiapkan secara sistematis segala kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Maramis, Nayoan, & Waworundeng, 2021). Perencanaan merupakan sebuah sistem bagaimana caranya untuk mencapai tujuan akhir yang semaksimal mungkin melalui sumber yang sudah tersedia agar lebih efektif dan efisien. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses dalam menentukan kebijakan pada masa yang akan datang, melalui tahapan pilihan, dengan berbagai unsur *stakeholder* yang terlibat, dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia dalam periode tertentu. Sehingga dapat diketahui bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu instruksi penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya dalam mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien. Perencanaan merupakan respons kepekaan terhadap masa depan.

Hubungan antara perencanaan dan pembangunan memiliki kompleksitas yang tinggi. Kompleksitas ini dapat dilihat dari beberapa teori perencanaan seperti teori perencanaan rasional komprehensif, *incremental*, advokasi, radikal, dan transaktif. Di sisi lain, kompleksitas pembangunan dapat diketahui melalui arti pembangunan yang semakin meluas serta pergeseran paradigma pembangunan yang meliputi paradigma modernisasi, dependensi, ekologi, kebutuhan dasar, pembebasan, dan endogen. Para ahli memiliki berbagai pandangan mengenai perencanaan pembangunan yang saling melengkapi satu sama lain. Dalam konteks tersebut, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai pengarah penggunaan sumber daya pembangunan yang terbatas agar dapat mencapai tujuan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien (Islamiyah, Fakhriannor, & Herman, 2021).

Secara prinsip, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan yang dibuat dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang selalu menjadi proses yang tidak berakhir. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah dapat ditemukan pada Pasal 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu “Untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat, mengembangkan peluang usaha, serta meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik dan daya saing daerah”. Tujuan perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yakni:

- a. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan yang terkait dalam pembangunan
- b. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

2.4.1 Unsur-Unsur Perencanaan pembangunan

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah perlu mempunyai perencanaan yang matang dan mantap agar pembangunan dapat berguna dan berhasil. Menurut (Anggara & Sumantri, 2016) dalam perencanaan pembangunan terdapat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Mengetahui lokus. mengetahui dan memahami kondisi umum daerah yang menjadi target pembangunan.
- b. Mempunyai visi dan misi pembangunan. untuk apa, siapa, dan mengapa pembangunan itu perlu dilakukan.

- c. Adanya prioritas pembangunan. untuk mewujudkan pengoptimalan terhadap pencapaian target pembangunan dengan anggaran dan sumber daya yang terbatas.
- d. Mempunyai strategi pembangunan. bertujuan agar pelaksanaan berjalan secara teratur dan mengutamakan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, yang tepat dan terarah.
- e. Mempunyai target pembangunan. tindakan nyata yang akan dilaksanakan dan periode yang dibutuhkan dari tujuan yang akan dicapai

2.4.2 Tahapan Perencanaan Pembangunan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat empat tahapan dari proses Perencanaan Pembangunan yang meliputi:

- 1) Penyusunan rencana; Langkah pertama dalam penyusunan rencana adalah membuat rancangan rencana pembangunan yang lengkap. Setiap instansi pemerintah kemudian mempersiapkan rancangan rencana kerja sesuai dengan rancangan rencana pembangunan yang sudah disiapkan dengan melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan oleh setiap tingkat pemerintahan melalui kegiatan musyawarah serta menyusun rancangan akhir rencana pembangunan.
- 2) Penetapan rencana; Setelah rencana disusun, tahap selanjutnya adalah penetapan rencana yang akan menjadi produk hukum yang mengikat semua pihak untuk melakukannya. Menurut Undang-Undang, rencana pembangunan jangka panjang Nasional maupun Daerah ditetapkan menjadi Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden/Kepala Daerah, serta rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden/Kepala Daerah.
- 3) Pengendalian pelaksanaan rencana; Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin terwujudnya tujuan dan target pembangunan yang sudah ditetapkan dalam rencana. Pengendalian ini

melibatkan kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD.

- 4) Evaluasi pelaksanaan rencana; Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan kegiatan yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi guna mengukur pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tertulis dalam dokumen rencana pembangunan.

2.4.3 Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas

Perencanaan yang berkualitas diperlukan agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah. Kualitas perencanaan pembangunan yang baik perlu ditunjang dengan ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat, menyangkut sumber daya yang tersedia, serta berbagai persoalan yang dapat dijadikan agenda dalam proses perencanaan pembangunan. BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan pengukuran mengenai perencanaan pembangunan yang berkualitas diukur dari indikator kinerja utama mereka yang diturunkan dari pereturan pusat yaitu Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil, verifikasi, validasi dan inventarisasi kemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang mana indikator yang digunakan yaitu

- 1) Keselarasan antar dokumen perencanaan
- 2) Keterisian data perencanaan
- 3) Inovasi yang dijadikan kebijakan

Selain itu indikator perencanaan pembangunan yang berkualitas dapat diketahui melalui kegiatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas rutin memberikan Anugerah Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Penilaian penghargaan tersebut tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan, namun juga pencapaian pembangunan daerah. Mengutip dari situs BAPPENAS dimana tujuan dari penilaian PPD, yaitu: “Mendorong setiap pemerintah daerah untuk menyiapkan dokumen RKPD dengan kualitas yang baik, mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan bermutu serta menciptakan dan mengembangkan inovasi yang

bermutu di daerah” (Bappenas, 2022). Dari beberapa indikator yang sudah dijelaskan diatas maka dapat peneliti simpulkan menjadi indikator dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas, di antaranya:

- a. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas
- b. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan
- c. Keterisian data dan informasi pembangunan daerah
- d. Hasil penelitian/inovasi yang dimanfaatkan menjadi kebijakan

2.5 Penelitian Terdahulu

Untuk melengkapi pembahasan dalam penelitian ini, berikut disampaikan perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini

- 1) “Pengaruh implementasi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah terhadap manajemen data dan informasi pembangunan dalam rangka mewujudkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah” (Asyaroh, 2019). Hasil dari penelitian tersebut yaitu implementasi kebijakan SIPD berpengaruh nyata terhadap manajemen data dan informasi pembangunan, implementasi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah berpengaruh nyata terhadap efektivitas perencanaan pembangunan daerah pada SKPD Kabupaten Sumedang. Perbandingan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu aplikasi yang digunakan dalam penelitian tersebut masih menggunakan versi lama yang belum tergabung dengan satu kesatuan aplikasi yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- 2) “Implementasi Sistem Informasi Perintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado)” (Wurara, Kimbal, & Kumayas, 2020). Komunikasi yang dilakukan BAPPELITBANGDA yakni dengan membentuk tim dan bekerja sesuai dengan tupoksi, dan terus berkoordinasi dengan Kemendagri pembuat SIPD serta mengimplementasikan secara virtual dan diadakan pertemuan secara langsung apabila dalam keadaan darurat sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Sumber daya manusia dan sumber daya finansial belum cukup memadai dalam terwujudnya implementasi dari SIPD, karena pengadaan BIMTEK yang kurang diadakan oleh BAPPELITBANGDA membuat

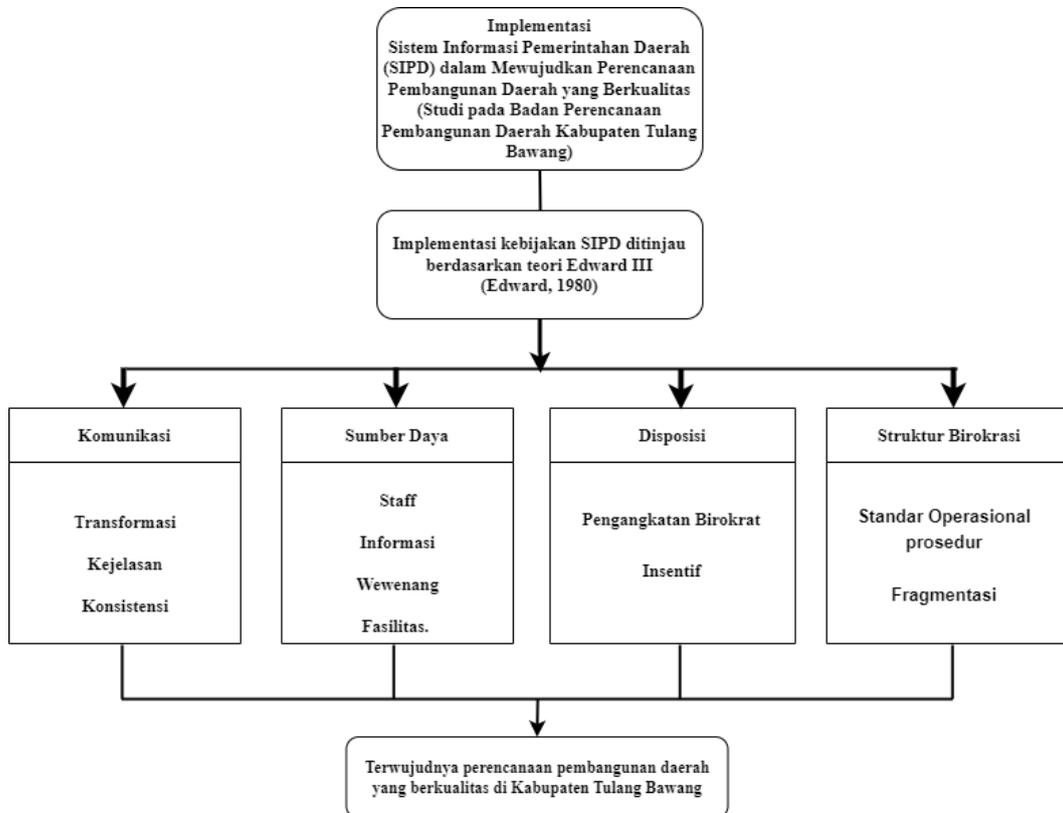
kualitas sumber daya kurang dalam mengoperasikan SIPD. sikap Implementor dalam hal ini kepala BAPPELITBANGDA dalam mengambil tindakan yaitu mengakomodir setiap bawahannya untuk bekerja sesuai dengan Tupoksinya. Struktur organisasi yang sesuai dan terarah mewujudkan keberhasilan implementasi SIPD di kota Manado, BAPPELITBANGDA adalah badan yang menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kurangnya sosialisasi SIPD sehingga masih kurang diketahui oleh masyarakat.

- 3) “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat” yang ditulis oleh Nadya Balqis, Zuhrizal Fadhly, Mauliyanda. Arti dari penelitian tersebut adalah bahwa pemerintah Aceh Barat telah berhasil menjalin komunikasi yang baik dengan sebagian besar instansi, namun belum terjalin dengan baik pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Meskipun sumber daya yang tersedia pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sudah sangat mendukung dalam pengimplementasian, namun tidak terdapat kesesuaian Tupoksi yang terjalin dari proses perencanaan hingga penatausahaan keuangan. Terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, terutama terkait waktu dalam implementasi aplikasi SIPD (Balqis, Fadhly, & Az, 2021).

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menghubungkan antara teori dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Manfaat dari kerangka berpikir yaitu membantu peneliti dalam menguji rumusan masalah, membantu memilih serta menemukan model yang cocok dalam penelitian. Pada dasarnya penguraian kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori implementasi menurut George Edward III, di mana dalam implementasi SIPD ini perlu mengetahui komunikasi sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi yang di dalamnya memiliki indikator masing-masing. Sehingga dapat diketahui apakah kebijakan SIPD mampu menciptakan perencanaan pembangunan

yang berkualitas atau tidak. penjabaran kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: diolah oleh peneliti dengan teori Edward III

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif, yang biasanya digunakan oleh sekelompok peneliti di bidang ilmu sosial sebagai metode ilmiah. Terdapat beberapa alasan yang mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi hasil penelitian kuantitatif. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memperkaya pemahaman dan menemukan pengetahuan baru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan dalam bentuk angka-angka. Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena berhubungan dengan interaksi sosial khususnya mengenai penyusunan perencanaan pembangunan daerah, sehingga hanya dapat diurai jika peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan cara ikut berperan serta, wawancara dan studi dokumentasi mendalam terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, catatan ilmiah, dan dokumentasi resmi. Penelitian kualitatif juga digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang digunakan dalam konteks yang alami, dengan menggunakan berbagai metode alami (Moloeng, 2015). Selain menghasilkan data, penelitian kualitatif juga mampu menghasilkan informasi yang signifikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk menjelaskan tentang Implementasi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas serta menganalisa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BAPPEDA

dalam penggunaan SIPD dalam terhadap pengelolaan data dan informasi pembangunan, sehingga didapatkan isu-isu strategis yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

3.2 Fokus penelitian

1. Pelaksanaan operasional SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dianalisis melalui teori keberhasilan implementasi dari George Edward III yang meliputi:
 - a. Komunikasi
 - 1) Transmisi dalam menyosialisasikan SIPD dari pusat hingga daerah di Kabupaten Tulang Bawang
 - 2) Kejelasan dalam menjelaskan SIPD di BAPPEDA Tulang Bawang
 - 3) Konsisten dalam sosialisasi SIPD di BAPPEDA Tulang Bawang
 - b. Sumber Daya,
 - 1) Staf yang menjadi operator SIPD di BAPPEDA Tulang Bawang
 - 2) Informasi mengenai kebijakan SIPD di BAPPEDA Tulang Bawang
 - 3) wewenang penggunaan SIPD di BAPPEDA Tulang Bawang
 - 4) Fasilitas pendukung untuk menjalankan SIPD di BAPPEDA Tulang Bawang
 - c. Disposisi
 - 1) Pengangkatan birokrat yang bertanggung jawab mengelola data SIPD di BAPPEDA Tulang Bawang
 - 2) Insentif yang diperoleh operator SIPD di BAPPEDA Tulang Bawang
 - d. Struktur Birokrasi
 - 1) SOP dalam menjalankan SIPD di BAPPEDA Tulang Bawang
 - 2) Fragmentasi dalam menjalankan SIPD di Tulang Bawang

Perencanaan pembangunan yang berkualitas dengan indikatornya yaitu ketersediaan dokumen perencanaan daerah, kesesuaian program antar dokumen perencanaan, keterisian data informasi pembangunan, dan hasil penelitian/inovasi yang menjadi kebijakan.

3.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada kantor BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang, Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena, BAPPEDA merupakan instansi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam proses perencanaan pembangunan, di mana, dalam prosesnya BAPPEDA menggunakan SIPD dalam mengumpulkan, memproses serta menyajikan data dan informasi terkait perencanaan pembangunan yang dilakukan setiap tahun.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain:

- a. Data Primer merupakan data yang didapat langsung oleh pencari data (peneliti) dari objek penelitiannya sehingga data tersebut bersifat faktual karena langsung dari peneliti (pertama). Untuk mendapatkannya, peneliti menggunakan dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen dengan hasil data yang didapatkan dalam proses ini berupa hasil rekaman suara atau catatan dari kegiatan observasi dan wawancara, sedangkan hasil dalam bentuk gambar diperoleh dari kegiatan studi dokumen.
- b. Data Sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian atau data tersebut sudah pernah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya sehingga memperkecil biaya dan waktu yang diperlukan. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan bersumber dari dokumen yang berkaitan dengan SIPD serta perencanaan pembangunan. Selain itu media online juga digunakan sebagai referensi yang berisi informasi-informasi, data serta studi kasus yang dapat di kaitkan dengan topik penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi

Observasi adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara memperhatikan secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data secara selektif. Dalam observasi, peneliti menggunakan pancaindra dan melaksanakan pengamatan secara langsung di tempat penelitian. Metode pengumpulan data ini dipilih

karena penelitian tersebut berkaitan dengan perilaku manusia, terutama dalam proses kerja untuk menyusun sebuah rencana. Peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan, di mana ia bertindak sebagai pengamat independen yang tak terlibat dalam kegiatan yang diamati.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam dapat diartikan sebagai kegiatan memperoleh keterangan dengan proses tanya jawab dengan informan yang bersangkutan dengan materi dalam judul penelitian ini. Informan dalam kegiatan wawancara tertuju kepada pegawai yang berperan penting dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan serta pengguna SIPD di kantor BAPPEDA Tulang Bawang.

Tabel 3. Daftar Informan Wawancara dalam Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Sisilia Novitasarie, S.Sos., MPPM.	Sekretaris
2	Berti, S.E.	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3	Siftian Budiawan, S.T., M.M.	Kasubag Bina Program
4	Robby Adhitya Mirhadi, S.T.	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan
5	Andhika Arief Rahman, S.H., M.M.	Kasubid Data dan Informasi

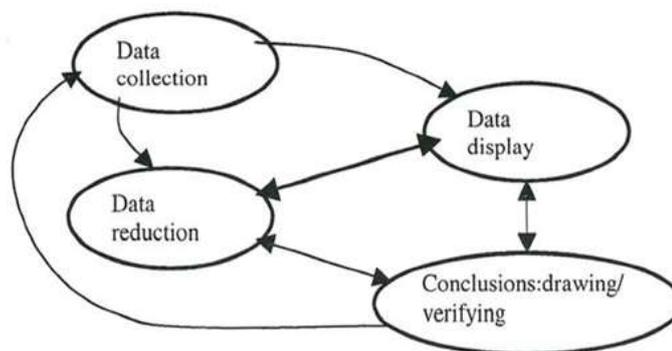
Sumber: dikelola oleh peneliti

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara pengumpulan data dan telaah pustaka, baik dalam bentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang yang mana dokumen dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti buku-buku daerah (RPJMD, RKPD, RENJA, RENSTRA); laporan, jurnal, literatur, majalah dan peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan undang-undang yang mendukung serta dokumen yang berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan proses perencanaan pembangunan).

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilaksanakan selama proses pengumpulan data sedang berlangsung atau setelah data terkumpul dalam jangka waktu tertentu. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013), aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga data dianggap sudah jenuh. Kegiatan dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 2. Komponen analisis data (*interactive model*)

(sumber: *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*)

a. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, tahap awal dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data atau *data reduction*. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan data yang kompleks agar dapat memenuhi kebutuhan penelitian dan mempermudah pengambilan informasi (Sugiyono, 2013). Data yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan lapangan, survei kepuasan pelanggan, dan lainnya, cenderung memiliki kompleksitas yang tinggi. Untuk mengatasi hal ini, semua data yang terkumpul harus dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Data yang kurang penting dapat dibuang, sehingga hanya data yang penting saja yang dipertahankan. Hal ini memungkinkan data yang tersedia menjadi lebih sederhana, lebih relevan dengan kebutuhan penelitian, dan dapat mewakili keseluruhan data yang terkumpul. Dengan demikian, data akan lebih mudah diproses ke tahap berikutnya dan diubah

menjadi informasi yang mudah dimengerti, jelas, dan dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi.

b. Penyajian Data

Berdasarkan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, setelah tahap reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data atau *data display*. Pada tahap ini, peneliti dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan bentuk tabel, grafik, atau bentuk lainnya agar data tersebut dapat disampaikan dengan lebih mudah. Proses penyajian data sangat penting dalam analisis data kualitatif agar data yang disajikan menjadi lebih terorganisir, sistematis, dan mudah dipahami. Selain itu, data yang telah disajikan juga dapat memberikan informasi yang jelas kepada pembaca.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan. Data yang telah disusun dan dikelompokkan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dengan teknik atau pola tertentu. Kesimpulan tersebut dapat diungkapkan dalam laporan penelitian dan ditempatkan pada bagian penutup agar pembaca juga dapat menemukan kesimpulan tersebut. Namun, penarikan kesimpulan hanya dapat dilakukan setelah semua data yang beragam telah direduksi, disusun, dan ditampilkan dengan media tertentu agar mudah dipahami. Dengan demikian, data yang semula mentah dapat disajikan sebagai suatu informasi yang relevan.

3.7 Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kuantitatif, kriteria pokok terhadap data hasil penelitian adalah, valid, reliabel dan objektif. Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan dalam penelitian, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan melakukan *member check*.

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peneliti dapat kembali ke lapangan untuk melakukan wawancara dan pengamatan kembali dengan

sumber data yang sudah ditemui sebelumnya maupun yang baru. Hal ini akan memperkuat hubungan antara peneliti dan narasumber, sehingga saling percaya dan tidak ada informasi yang dirahasiakan lagi. Durasi perpanjangan pengamatan tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Kedalaman mengacu pada sejauh mana peneliti ingin menggali makna data yang tersembunyi. Keluasan mengacu pada jumlah informasi yang diperoleh, sementara kepastian mengacu pada validitas data.

b. Triangulasi

Untuk memastikan kredibilitas data penelitian, disarankan untuk melakukan triangulasi, yaitu pemeriksaan data dari bermacam sumber dengan bermacam cara dan waktu. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara memeriksa data dari sumber yang sama dengan cara yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

c. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi merupakan bahan yang digunakan untuk mendukung data yang sudah didapatkan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu disertai dengan bukti rekaman dan catatan, sedangkan data tentang interaksi manusia atau gambaran keadaan harus ditunjang oleh foto-foto. Peralatan seperti kamera dan alat rekam suara sangat diperlukan untuk merekam data dalam penelitian kualitatif dan untuk memperkuat kredibilitas data yang didapatkan oleh peneliti. Dalam penyusunan laporan penelitian, sangat disarankan untuk menyertakan foto-foto atau dokumen autentik sebagai pelengkap data agar lebih dapat dipercaya.

d. Mengadakan *member check*

Salah satu cara untuk memastikan keakuratan data yang didapatkan oleh peneliti adalah dengan melakukan *member check*. *Member check* merupakan proses pemeriksaan data oleh pemberi data untuk memverifikasi kecocokan antara data yang didapatkan oleh peneliti dengan informasi yang disajikan

oleh penyaji data. Jika data yang didapatkan disetujui oleh para pemberi data, maka data tersebut dianggap valid dan semakin kredibel. Namun, jika terdapat perbedaan yang signifikan, peneliti harus merevisi temuannya. Tujuan dari *member check* adalah untuk memastikan bahwa informasi yang dipakai dalam penelitian selaras dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data. Pelaksanaan *member check* dapat dilaksanakan secara individual dan melalui forum diskusi kelompok

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi SIPD dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas di BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang, maka penulis menyimpulkan:

1. Implementasi SIPD dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Tulang Bawang

Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, SIPD sudah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan fungsinya. SIPD dapat mengefektifkan setiap proses penyusunan dokumen perencanaan, baik dalam pengumpulan data perencanaan, penginputan data dan usulan masyarakat, hingga tahap pelaporan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, baik dari pegawai yang belum bisa mengolah data mentah menjadi data yang siap digunakan dalam perencanaan, serta jaringan yang kurang stabil

2. Faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan SIPD dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

- a) Faktor pendukung

- 1) Komunikasi. Transisi, kejelasan, dan konsistensi dari sosialisasi yang dilakukan pemerintah pusat kepada BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang terlaksana dengan baik.
- 2) Sumber daya. Jumlah pelaksana SIPD di BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang sudah cukup, informasi mengenai panduan pelaksanaan SIPD sudah tersedia, wewenang dalam mengoperasikan SIPD sudah sesuai Tupoksinya masing-masing, dan kelengkapan fasilitas yang diperlukan.
- 3) Disposisi. Pengangkatan operator dipilih sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan, serta ketersediaan insentif yang

diberikan kepada operator SIPD sebagai *reward* terhadap tugas yang diemban.

- 4) Struktur birokrasi. Ketersediaan SOP dalam implementasi SIPD disusun berpedoman pada peraturan yang berkaitan dengan SIPD dan perencanaan pembangunan. Sedangkan fragmentasi di BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

b) Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi SIPD di BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang terdapat pada; staf yang kurang berkompeten dalam penguasaan teori perencanaan, informasi yang kurang lengkap khususnya mengenai aturan tentang kepatuhan dalam menjalankan SIPD, serta fasilitas terutama mengenai jaringan yang kurang stabil.

Perencanaan yang dihasilkan dengan implementasi SIPD sudah berkualitas, karena sudah memenuhi indikator pengukuran menurut keputusan menteri dalam negeri 050-5889 tahun 2021 yakni dokumen perencanaan sudah tersedia dan lengkap, program disetiap dokumen perencanaan sudah selaras, keterisian data perencanaan sudah mencapai target, serta inovasi yang diangkat menjadi suatu kebijakan.

5.2 Saran

- a) Mengenai kompetensi setiap pelaksana SIPD di BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang perlu ditingkatkan, khususnya dalam mengolah dan menganalisis data mentah menjadi data yang siap digunakan dalam perencanaan sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan/Bimtek atau pendidikan lanjutan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai bidangnya untuk mematangkan pengetahuan di bidang perencanaan.
- b) Dalam hal informasi khususnya mengenai kepatuhan dalam pelaksanaan SIPD perlu dijabarkan dalam peraturan secara tertulis dalam bentuk peraturan atau perlu dicantumkan undang undang yang berkaitan mengenai sanksi serta konsekuensi mengenai kepatuhan dalam melaksanakan suatu kebijakan,

sehingga setiap operator tidak semena-mena dalam menjalankan tugasnya termasuk pada tingkat kecamatan dan desa dalam mengoperasikan SIPD.

- c) Dalam hal fasilitas yang menjadi sumber daya pendukung, diperlukan adanya *upgrade* paket langganan atau menambah *router*/perangkat jaringan agar jaringan tetap stabil jika digunakan secara bersamaan, khususnya pada ruangan yang jauh dari perangkat jaringan, sehingga tidak menghambat dalam setiap proses pekerjaan yang memerlukan jaringan internet khususnya dalam mengoperasikan SIPD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfa Beta.
- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Pustaka Setia, 1689–1699.
- Edward, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. (R. L. Peabody, Ed.). Washington, D.C.: Washington, D.C. : Congressional Quarterly Press.
Retrieved from
<https://archive.org/details/implementingpubl0000edwa/page/n3/mode/1up>
- Hartono, J. (2004). *Pengenalan Komputer: Dasar Ilmu Komputer, Pemrograman, Sistem Informasi dan Inteligensi Buatan*. Yogyakarta: Andi.
- Islamiyah, D., Fakhriannor, & Herman, M. (2021). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021. *Doctoral Dissertation*.
- Kartono, D., & Nurcholis, H. (2016). *Konsep dan Teori Pembangunan. Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota, IPEM4542/M*.
- Moloeng., L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nursini. (2010). *Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah, Teori dan Aplikasi*.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*.
- Purnama, C. (2016). *Sistem Informasi Manajemen. Jurnal Sistem Informasi (Vol. 2)*.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The Implementation Of Public Policy: A Framework Of Analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4).
<https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>
- Subarsono, A. . (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,*

Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. (D. Mariana & C. Paskarina, Eds.) (1st ed.). Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung. Retrieved from https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_publik_t.pdf

Vellya asril imami. (2021). Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen Dan Peranan Manajemen Dalam Sistem Informasi. *Pendidikan*.

Wahab, S. A. (2012). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara (Vol. 77).

Wibawa, S. (2012). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 232.

Jurnal

Asyaroh, S. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Terhadap Manajemen Data dan Informasi Perencanaan. *Journal Of Regional Public*

Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1). <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1953>

Dione, F. (2020). Implementation of Regional Development Information System (SIPD) in Increasing Coordination of Regional Development. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061>

Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21.

Kasmira, Alyas, & Sudarmi. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(3).

Lumabi, A. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Pemberdayaan Untuk Penanggulangan Kemiskinan. *JURNAL POLITICO*.

Maramis, A. P. P. M., Nayoan, H., & Waworundeng, W. (2021). Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara. *JURNAL GOVERNANCE*, 1(1).

Silviani, I., Pardede, I. F., & Sembiring, D. C. (2020). Komunikasi Krisis Dalam New Normal. *MESSAGE: JURNAL KOMUNIKASI*, 9(1).

Winarno, P., Kusnadi, A., & Afriliana, N. (2019). Implementasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tangerang. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2. <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v2i0.500>

- Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Perintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(5).
- Yulyana, E. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Terkait Dengan Persiapan Transformasi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karawang. *Majalah Ilmiah SOLUSI*, 2(5).

Situs Web:

- Bappedalitbang. (2019). Pentingnya Data dan Informasi dalam SIPD untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah – Bappedalitbang. Retrieved November 24, 2022, from <https://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/pentingnya-data-dan-informasi-dalam-sipd-untuk-penyusunan-dokumen-perencanaan-pembangunan-daerah/>
- Bappenas. (2022). Serahkan PPD dan Penghargaan Khusus, Bappenas Dorong Inovasi Pembangunan Daerah | Kementerian PPN/Bappenas. Retrieved January 18, 2023, from <https://www.bappenas.go.id/id/berita/serahkan-ppd-dan-penghargaan-khusus-bappenas-dorong-inovasi-pembangunan-daerah-wQ3km>
- Kemndagri. (2014). Tanpa Data, Pembangunan Daerah akan Semaunya. Retrieved December 26, 2022, from https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/34/inisiasi_ct_tangkal_kerusakan_pesisir_dan_laut
- Kurniawan, B. (2019, Maret 9). konsultasi permasalahan regulasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Diambil kembali dari info publik Solok: <https://infopublik.solokkota.go.id/konsultasi-permasalahan-regulasi-perencanaan-pembangunan-pusat-dan-daerah/>
- Mquino. (2020, Februari 5). *Sekilas tentang Perencanaan Pembangunan*. Diambil kembali dari <https://hukumlingkungan.or.id/2020/02/05/sekilas-tentang-perencanaan-pembangunan/>
- Pembangunan Indonesia dan permasalahannya. (2016, Mei 30). Diambil kembali dari [BAPPEDA Kabupaten Buleleng: https://BAPPEDA.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-indonesia-dan-permasalahannya-44](https://BAPPEDA.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-indonesia-dan-permasalahannya-44)

Prameswara, A. (2015, April 15). *Ditjen Bina Pembangunan Daerah*. Diambil Kembali Dari SIPD Bagian Integral Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah:
https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/52/sipd_bagian_integral_dokumen_perencanaan_pembangunan_daerah

Prawiro, M. (2020, Juni 19). *Pengertian Kualitas: Memahami Apa Itu Kualitas dan Unsur-Unsurnya*. Diambil kembali dari Maxmanroe:
<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-kualitas.html>

Dokumen lainnya:

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Indonesia

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 2019. Tulang Bawang.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 2020. Tulang Bawang.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 2021. Tulang Bawang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. (2021). Tulang Bawang

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan 2017-2022. (2021). Tulang Bawang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang sistem informasi pembangunan daerah. Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang sistem informasi pembangunan daerah. Indonesia

Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil, verifikasi, validasi dan inventarisasi kemitakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Indonesia